



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# Sinergi Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Prioritas Kerja Presiden dan Wakil Presiden

**Batam, 3 Desember 2021**

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# **VISI DAN MISI INDONESIA MAJU 2019-2024**

## **VISI**

**TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI,  
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**



## **MISI**

- 1. PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA.**
- 2. STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING.**
- 3. PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN.**
- 4. MENCAPAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN.**
- 5. KEMAJUAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA.**
- 6. PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA.**
- 7. PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA.**
- 8. PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA.**
- 9. SINERGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.**

# 5 Prioritas Kerja 2019-2024



1

## Pembangunan SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global

2

## Pembangunan Infrastruktur

- Penghubung produksi dan distribusi
- Mempermudah akses wisata
- Mendongkrak lapangan kerja
- Nilai tambah perekonomian

3

## Simplifikasi Regulasi

- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

4

## Penyederhanaan Birokrasi

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon
- Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional

5

## Transformasi Ekonomi

- Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional

  
**TUJUAN & SASARAN**  
Reformasi Birokrasi 2020-2024

**PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH:**

1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

2. BIROKRASI YANG KAPABEL

3. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

MANAJEMEN  
PERUBAHAN

DEREGULASI  
KEBIJAKAN

PENATAAN  
ORGANISASI

PENATAAN TATA  
LAKSANA

PENATAAN SDM  
APARATUR

PENGUATAN  
AKUNTABILITAS

PENGUATAN  
PENGAWASAN

PENINGKATAN  
KUALITAS  
PELAYANAN  
PUBLIK

  
PERTUMBUHAN  
EKONOMI  
DAN  
KEBERHASILAN  
PEMBANGUNAN  
NASIONAL

AREA PERUBAHAN

# EKSPEKTASI **PRESIDEN** TENTANG REFORMASI BIROKRASI



## BIROKRASI YANG MENCIPTAKAN HASIL

“Sering kali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Tetapi setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. **Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya**”



## BIROKRASI YANG **MAKING DELIVERED**

“Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya *sending-sending* saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah **making delivered**. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat”



## BIROKRASI YANG BERDAYA SAING

“Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan Reformasi Birokrasi bukan hanya untuk mendapatkan birokrasi yang profesional, yang mampu melayani rakyat, tetapi juga meletakkan fondasi bagi bangsa untuk **memenangkan pertandingan global**, tanpa reformasi birokrasi kita akan semakin tertinggal dengan negara lain dalam meraih kemajuan”



## BIROKRASI YANG SEDERHANA LINCAH DAN CEPAT

“Reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. **Kelembagaan pemerintahan yang gemuk**, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan”

“Di era persaingan antar negara yang semakin sengit yang cepat akan mengalahkan yang lambat, yang **cepat beradaptasi dengan teknologi** akan mengalahkan yang gagap teknologi”

## BIROKRASI YANG SEDERHANA, LINCAH DAN CEPAT (AGILE)

-  46.159 struktur unit organisasi Jabatan Administrasi pada KL telah disederhanakan
-  45 Jabatan Fungsional baru (berdasarkan keahlian), 124 usulan JF baru, sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi
-  37 LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada K/L yang sesuai
-  91% Kementerian telah memiliki tata kelola SPBE yang baik

## BIROKRASI YANG BERORIENTASI HASIL

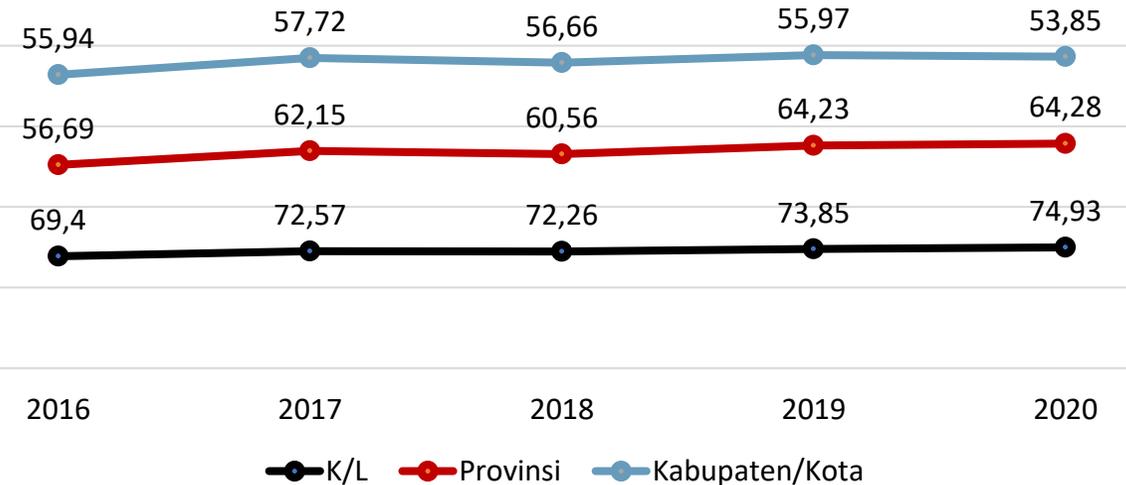
-  Implementasi SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD

## BIROKRASI DENGAN PELAYANAN PRIMA & BEBAS KKN

-  Terbentuk 1.598 unit percontohan pelayanan prima & anti korupsi, termasuk pada sektor penegak hukum
-  Program RB telah terkonsolidasi dalam kegiatan STRANAS Pencegahan Korupsi
-  Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan 48 Mall Pelayanan Publik (MPP) di daerah

# HASIL REFORMASI BIROKRASI

RATA – RATA NILAI RB TAHUN 2015 - 2020

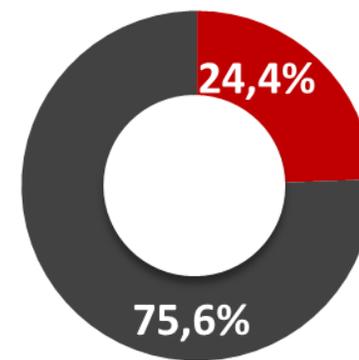


# Nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Tahun 2020

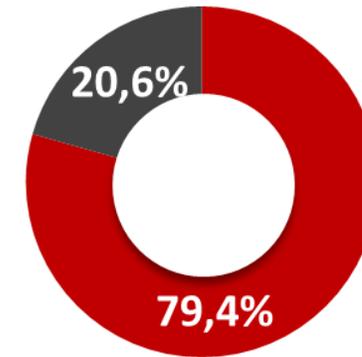
## RB PEMDA

- Perlu fokus pada perbaikan kualitas reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten/Kota.
- Pada tahun 2020, sebanyak **109 Pemerintah Daerah** belum melaporkan hasil pelaksanaan RB nya kepada Kementerian PANRB.

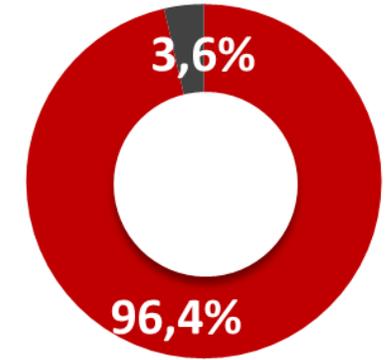
## HASIL REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020



Kabupaten/Kota



Provinsi



Kementerian/Lembaga



# SAKIP MENDORONG EFEKTIVITAS & EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

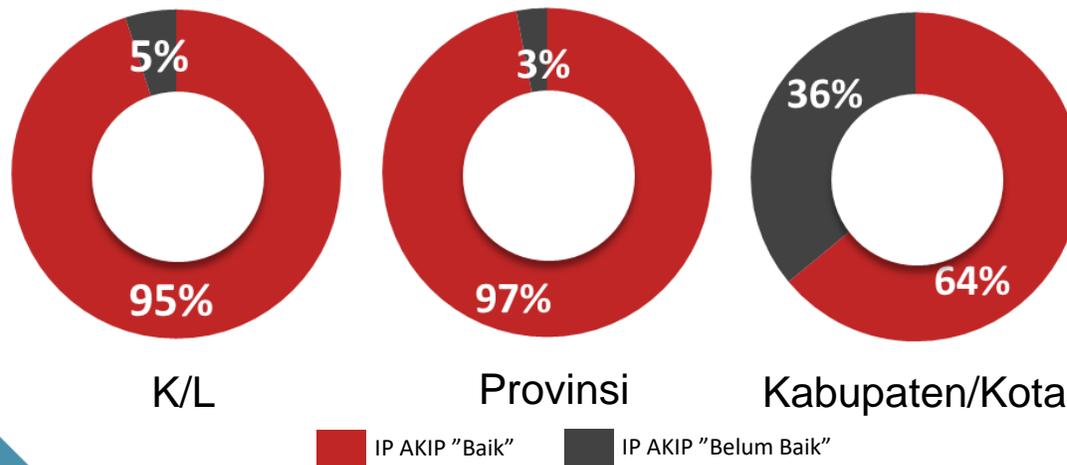
 Semakin banyak Instansi Pemerintah yang telah menerapkan *money follow program* secara baik melalui pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan kinerja

 Semakin banyak Instansi Pemerintah yang melakukan *crosscutting* program/kegiatan, sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi

 Implementasi *money follow program* mencegah potensi pemborosan APBN/APBD

 SAKIP mendorong Trilateral Kinerja (Kementerian PANRB, BAPPENAS, Kemenkeu) untuk pencegahan penggunaan yang menyimpang dan tidak tepat sasaran

## Hasil SAKIP Tahun 2020



## DI. YOGYAKARTA

- ✓ DIY menghapus 2296 kegiatan yang tidak selaras dengan tujuan, dengan nilai efisiensi sebesar 1,6 Triliun (40% APBD).
- ✓ DIY telah mampu mengimplementasikan *Performance Based Organization*.
- ✓ DIY mengimplementasikan *Reward & Punishment* berbasis kinerja individu.

## JAWA TENGAH

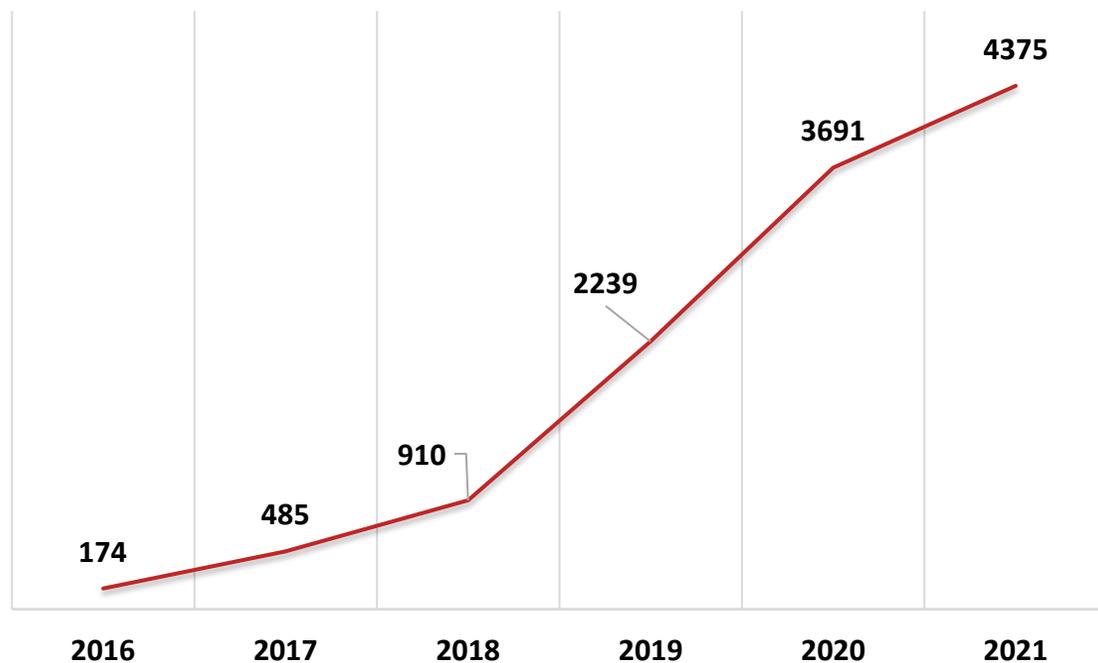
- ✓ Refocusing dari 4646 kegiatan menjadi 890 kegiatan yang berdampak bagi masyarakat.
- ✓ Potensi inefisiensi yang dicegah sebesar 1,2 Triliun digunakan untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan di Jawa Tengah.

## BANYUWANGI

- ✓ Refocusing 871 kegiatan yang tidak selaras, dengan nilai efisiensi hingga 1 Triliun (38% dari total APBD).
- ✓ Banyuwangi mampu mendongkrak sektor pariwisata melalui *Crosscutting* program lintas OPD.

# Zona Integritas: Unit Percontohan Bersih Melayani

*Miniatur Implementasi RB pada Unit Kerja Strategis*



TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Pengusulan	174	485	910	2.239	3.691	<b>7.583</b>
WBK	15	71	200	469	681	<b>1.459</b>
WBBM	2	6	5	34	82	<b>139</b>

- ✓ Pemberantasan calo di Kepolisian
- ✓ Digitalisasi pelayanan (Pembuatan SIM - STNK *online* dan keliling, *Electronic Traffic Law Enforcement*)
- ✓ Pelayanan hingga malam
- ✓ Upaya pendekatan ke masyarakat



**Kepolisian**



- ✓ Aplikasi progres penanganan perkara CMS
- ✓ Bantuan hukum gratis kepada masyarakat & instansi lain
- ✓ Pendampingan hukum pada sektor strategis (Contoh: Dana Desa)
- ✓ Perlindungan saksi: rumah singgah saksi

**Kejaksaan**

- ✓ Kecepatan & kemudahan pelayanan paspor: paspor online & jemput bola
- ✓ Digitalisasi sistem pengawasan pada LAPAS



**KEMENKUMHAM**



- ✓ Transparansi penyelesaian perkara melalui sistem informasi
- ✓ Digitalisasi sistem kontrol hakim untuk menjaga integritas
- ✓ Integrasi data dengan instansi lain: Disdukcapil PA

**MA**

- ✓ Pencegahan calo di Disdukcapil
- ✓ Digitalisasi pelayanan Dukcapil online
- ✓ Kecepatan pelayanan 3 in 1, 1 jam selesai
- ✓ Pelayanan jemput bola
- ✓ Anjungan mandiri hingga level kecamatan & desa



**DISDUKCAPIL**

# KEBIJAKAN SPBE SEBAGAI PENDUKUNG TRANSFORMASI TATA KELOLA

PRESIDENSI G20 INDONESIA

## “RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER”



### 3 FOKUS UTAMA **INDONESIA:**

- 1  “Penanganan kesehatan yang inklusif.”
- 2  “Transformasi berbasis digital.”
- 3  “Transisi menuju energi berkelanjutan.”

*Presiden Jokowi* | pada pembukaan Presidensi G20 Indonesia  
Rabu, 1 Desember 2021

# ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih,  
dan berwibawa berdasarkan hukum serta  
birokrasi yang profesional dan netral

**KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

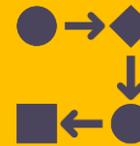
APARATUR SIPIL NEGARA

KELEMBAGAAN &  
PROSES BISNIS ORGANISASI

AKUNTABILITAS KINERJA  
& PENGAWASAN

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**PENATAAN KELEMBAGAAN BERBASIS  
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**



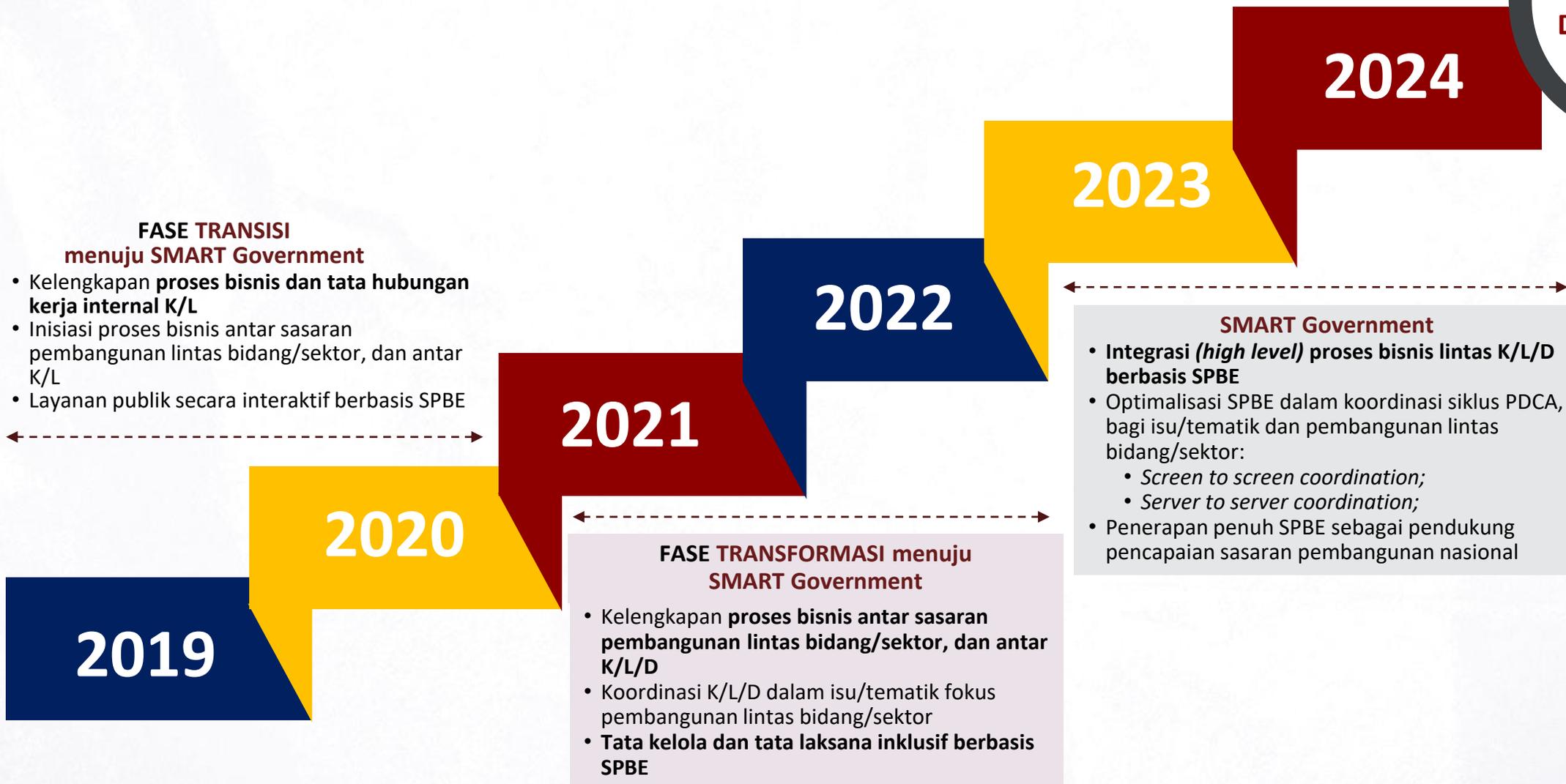
**Penataan Kelembagaan  
dan Proses Bisnis Instansi  
Pemerintah**



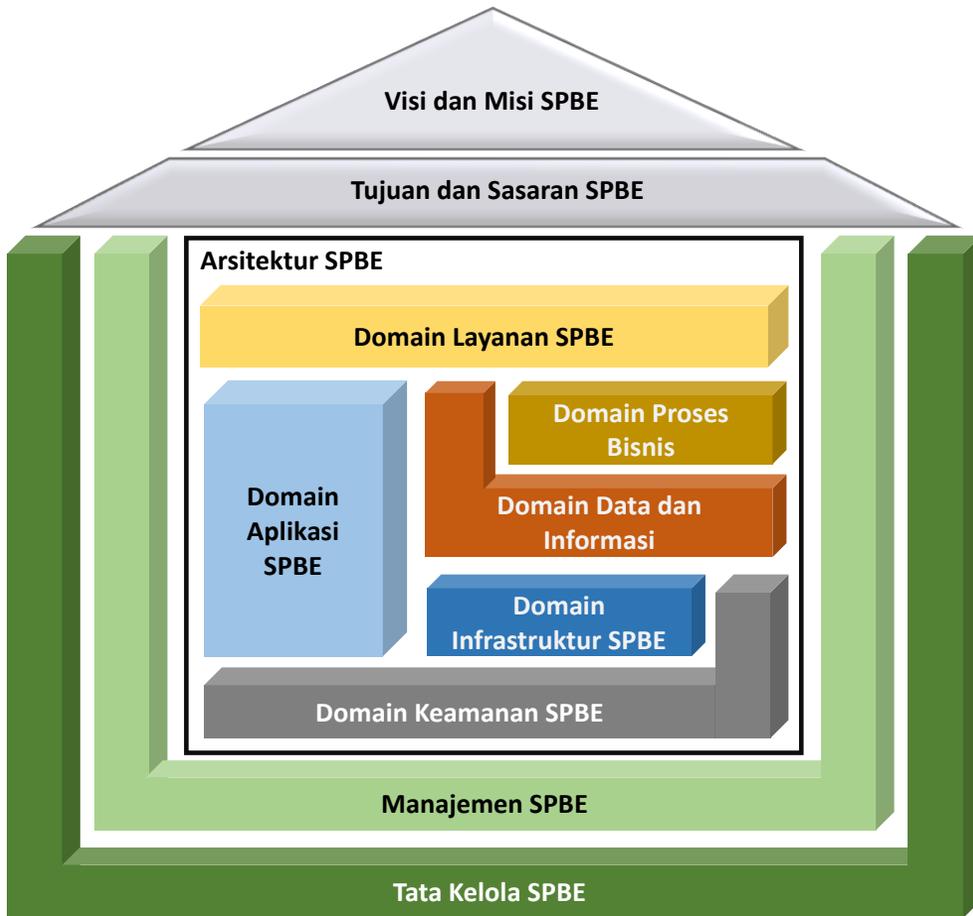
**Penerapan SPBE yang  
Terpadu**

# STRATEGI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN & TATA LAKSANA 2020-2024

**PRAKTEK  
PEMERINTAHAN  
DINAMIS 2025**



# KEBIJAKAN ARSITEKTUR SPBE UNTUK KETERPADUAN TATA KELOLA PEMERINTAH



KERANGKA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

## DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

## MANFAAT

- 1 Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan
- 2 Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi
- 3 Menerapkan **standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement)**
- 4 Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan **Satu Data Indonesia**
- 5 Memudahkan **integrasi layanan pemerintah**, sehingga menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis** dan layanan baru
- 6 Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga **meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE**

# DUKUNGAN SUPER APPS

## UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJMN 2020 – 2024

ARAHAN PRESIDEN

7 AGENDA PEMBANGUNAN



**Digitalisasi  
Proses  
Bisnis  
Internal**



**Tematik  
Layanan  
Publik  
Terintegrasi**



**Kolaborasi proses bisnis  
lintas bidang/sector  
pemerintah (*screen to  
screen coordination*)**

**Government to Citizen (G2C)**

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan umum
- Perumahan
- Keamanan
- Sosial
- dll

**Government to Business (G2B)**

- Industri
- Perdagangan
- Investasi
- Perizinan dan akreditasi
- dll

# Kebijakan dan Strategi Penyederhanaan Birokrasi

**GOVERNANCE 4.0**  
**UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA MEWUJUDKAN**  
**BIROKRASI BERKELAS DUNIA**

## Transformasi Organisasi

*Delaying*

Mekanisme Kerja yang  
Fleksibel & Kolaboratif

## Transformasi Sistem Kerja (Digitalisasi)

Digitalisasi Proses Bisnis  
Internal

Digitalisasi Pelayanan Publik

## Transformasi SDM





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

## The evolution of the employee



Source: Jacob Morgan, Author, *The Future of Work*

# DEFINISI BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

-  **Berorientasi Pelayanan**  
Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
-  **Akuntabel**  
Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan
-  **Kompeten**  
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
-  **Harmonis**  
Saling peduli dan menghargai perbedaan
-  **Loyal**  
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
-  **Adaptif**  
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
-  **Kolaboratif**  
Membangun kerja sama yang sinergis

# CORE VALUES ASN

## Presiden Luncurkan Fondasi Baru Bagi Aparatur Sipil Negara

### Core Values 'BERAKHLAK'

- Berorientasi Pelayanan
- Akuntabel
- Kompeten
- Harmonis
- Loyal
- Adaptif
- Kolaboratif

### Employer Branding:

# Bangga  
Melayani  
Bangsa

“Saat ini dunia menjadi serba  
*hybrid*, serba kolaboratif. Tidak  
boleh lagi ada ego. Ego sektor,  
ego daerah, dan ego ilmu.”

Presiden Jokowi  
Selasa, 27 Juli 2021



# Road Map Bidang **Pelayanan Publik**



# Integrasi Pelayanan Publik Melalui MPP

(Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik)

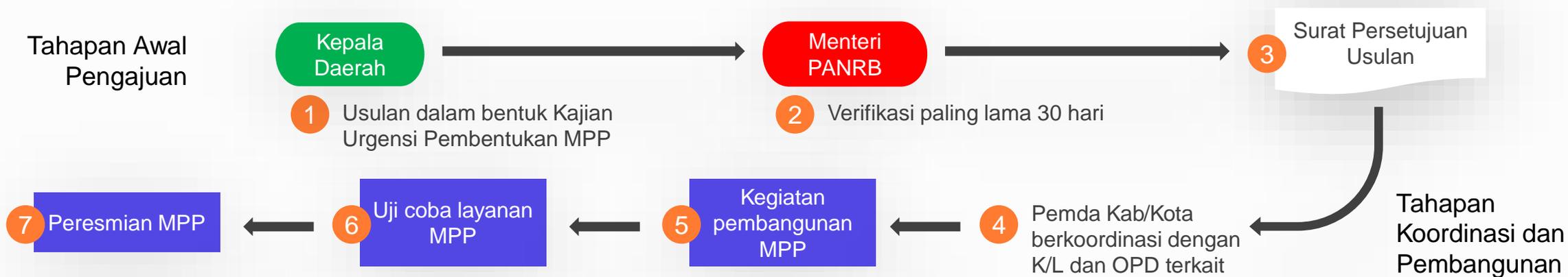
## Mal Pelayanan Publik

Pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, Lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

## Tujuan Dibentuknya MPP

1. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan;
2. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

## Tahapan Pembentukan MPP



# Data MPP yang Telah Diresmikan

Data per tahun 2017 s.d 29 November 2021

No	Nama MPP	Tgl Peresmian	Jumlah Layanan	Instansi Terintegrasi
1	MPP Prov. DKI Jakarta	12 Oktober 2017	328 layanan	14 instansi
2	MPP Kota Surabaya	6 Oktober 2017	222 layanan	31 instansi
3	MPP Kab. Banyuwangi	6 Oktober 2017	213 layanan	24 instansi
4	MPP Kota Denpasar	12 Februari 2018	229 layanan	20 instansi
5	MPP Kota Tomohon	21 April 2018	233 layanan	15 instansi
6	MPP Kab. Karangasem	22 Juni 2018	166 layanan	19 instansi
7	MPP Kab. Badung	17 September 2018	121 layanan	25 instansi
8	MPP Kota Batam	20 September 2018	429 layanan	33 instansi
9	MPP Kab. Probolinggo	19 Desember 2018	204 layanan	30 instansi
10	MPP Kota Padang	27 Desember 2018	106 layanan	16 instansi
11	MPP Kab. Kulon Progo	28 Desember 2018	121 layanan	20 instansi
12	Kab. Banyumas	18 Januari 2019	120 layanan	19 instansi
13	MPP Kab. Sidoarjo	29 Januari 2019	168 layanan	23 instansi
14	MPP Kota Pekanbaru	6 Maret 2019	177 layanan	26 instansi
15	MPP Kota Palopo	3 Mei 2019	56 layanan	15 instansi
16	MPP Kab. Sleman	15 Mei 2019	103 layanan	14 instansi
17	MPP Kota Bogor	26 Agustus 2019	145 layanan	14 instansi
18	MPP Kab. Sumedang	16 September 2019	361 layanan	23 Instansi
19	MPP Kota Banda Aceh	3 Desember 2019	120 layanan	29 Instansi
20	MPP Kota Payakumbuh	17 Desember 2019	168 layanan	17 instansi
21	MPP Kota Samarinda	19 Desember 2019	176 layanan	23 instansi
22	MPP Kab. Kebumen	20 Desember 2019	250 layanan	24 instansi
23	MPP Kab. Batang	23 Januari 2020	329 layanan	23 instansi

No	Nama MPP	Tgl Peresmian	Jumlah Layanan	Instansi Terintegrasi
24	MPP Kab. Barru	20 Februari 2020	110 Layanan	21 Instansi
25	MPP Prov. Sulawesi Tengah dan Kota Palu	15 Juli 2020	256 layanan	14 instansi
26	MPP Kota Surakarta	28 Agustus 2020	377 layanan	21 instansi
27	MPP Kab. Pandeglang	31 Agustus 2020	223 layanan	23 instansi
28	MPP Kab. Jepara	1 Oktober 2020	222 layanan	20 instansi
29	MPP Kab. Tulang Bawang	4 November 2020	159 layanan	24 instansi
30	MPP Kota Palembang	27 November 2020	373 layanan	28 instansi
31	MPP Kab. Purwakarta	7 Desember 2020	182 layanan	33 instansi
32	MPP Kab. Tabalong	14 Desember 2020	191 layanan	22 instansi
33	MPP Kab. Pati	17 Desember 2020	305 layanan	22 instansi
34	MPP Kab. Bone Bolango	27 Januari 2021	273 layanan	22 instansi
35	MPP Kab. Lamongan	10 Februari 2021	225 layanan	34 instansi
36	MPP Kota Bekasi	10 Maret 2021	143 layanan	23 instansi
37	MPP Kota Salatiga	19 Maret 2021	195 layanan	21 instansi
38	MPP Kab. Magetan	5 April 2021	273 layanan	28 instansi
39	MPP Kab. Bojonegoro	6 April 2021	202 layanan	29 instansi
40	MPP Kab. Gresik	7 April 2021	133layanan	16 instansi
41	MPP Kota Tangerang Selatan	15 April 2021	289 layanan	17 instansi
42	MPP Kab. Kendal	2 Juni 2021	304 layanan	23 instansi
43	MPP Kab. Blora	3 Juni 2021	261layanan	29 instansi
44	MPP Karawang	14 September 2021	69 layanan	19 instansi
45	MPP Bombana	14 Oktober 2021	156layanan	14 instansi
46	MPP Kab. Bekasi	17 November 2021	125 layanan	20 instansi
47	MPP Kab. Madiun	24 November 2021	131 layanan	23 instansi
48	MPP Kab. Selayar	29 November 2021	144 layanan	16 instansi

# Strategi Percepatan Integrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- 1. Perpres MPP**  
Penetapan Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan MPP yang mengatur tentang kelembagaan, mekanisme pengelolaan sumber daya dan pembiayaan.
- 2. Studi Tiru/Pendampingan Intensif**  
Melakukan fasilitasi studi tiru dan pendampingan intensif kepada ibukota Provinsi dan beberapa kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
- 3. Pembangunan Sistem Informasi MPP**  
Mengembangkan sistem informasi terpusat untuk mekanisme pengusulan hingga tahapan pembentukan dan peresmian MPP, serta untuk integrasi data MPP.
- 4. Penyusunan Instrumen Monev MPP**  
Instrumen ini bertujuan untuk mengukur dampak dari penyelenggaraan MPP yang telah terbangun selama ini.
- 5. Kolaborasi/sinergi antar lembaga**  
Mendorong upaya kolaborasi dan sinergitas antar instansi/Lembaga terkait seperti Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kementerian Keuangan, BKPM, dan seluruh Pemerintah Provinsi.
- 6. Penyusunan Permenpan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MPP.**
- 7. Pendampingan terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).**



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA KASIH**



**kempanrb**



**kemenpanrb**



**Kementerian-PANRB**